

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 2 Juli 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Republika (Halaman 1)	Selasa, 2 Juli 2019	Kekeringan Meluas	Luas lahan pertanian dan wilayah yang dilanda kekeringan akibat kemarau terus bertambah. Pasokan air sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan sawah para petani serta keberlangsungan hidup warga di daerah yang mengalami krisis air bersih.
2	Republika (Halaman 4)	Selasa, 2 Juli 2019	Pembebasan Lahan Tol Japek II Selatan Dikebut	PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) mempercepat tahapan pelaksanaan pembangunan jalan Tol Jakarta Cikampek (Japek) II Selatan. Saat ini, perusahaan tersebut telah membahas ganti rugi lahan, imbas dari proyek tersebut.
3	Media Indonesia (Halaman 15)	Selasa, 2 Juli 2019	Hunian di Atap Mal Terobosan Kreatif	Konsep hunian di atas gedung atau atap bangunan lain dinilai sebagai terobosan kreatif. Yang penting konsumen paham bahwa status kepemilikannya, yaitu strata title, bukan rumah tapak.
4	Media Indonesia (Halaman 15)	Selasa, 2 Juli 2019	Hunian Dekat Transportasi Publik Lebih Diminati	Warga Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek) lebih suka memilih hunian berdekatan dengan akses transportasi public, baik itu lintas rel terpadu (LRT) maupun Trans-Jakarta.
5	Media Indonesia (Halaman 18)	Selasa, 2 Juli 2019	Banyumas Cerdas Atasi Krisis Air	Musim kering tidak membuat warga di sejumlah desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, keder. Pemerintah kabupaten sudah menggelar program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat alias pamsimas.
6	Kompas (Halaman 7)	Selasa, 2 Juli 2019	Memindahkan Ibukota	Wacana pemindahan ibukota Indonesia muncul kembali dan pemerintah telah melakukan studi yang komperhensif, khususnya dari aspek infrastruktur fisik.
7	Kompas (Halaman 7)	Selasa, 2 Juli 2019	Mewujudkan 10 Balu Baru dan KEK	Beberapa tahun terakhir, geliat industry pariwisata kian bergairah, tercermin antara lain dari peningkatan kontribusinya terhadap produk domestic bruto (PDB).
8	Kompas (Halaman 9)	Selasa, 2 Juli 2019	Bali Seribu Tahun Muliakan Air	Tradisi masyarakat Bali menghormati dan memuliakan air sudah berlangsung sekitar 1.000 tahun lalu. Kearifan lokal itu berlanjut terus-menerus hingga saat ini.
9	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Selasa, 2 Juli 2019	Seksi 3A Masih Terkendala Pembebasan Lahan	Anak usaha PT Jasa Marga Tbk., yakni PT Marga Sarana Jabar, menargetkan jalan tol Bogor Ring Road selesai tahun ini meskipun ada sedikit kendala pembebasan lahan pada seksi 3A.
10	Bisnis Indonesia (Halaman 7)	Selasa, 2 Juli 2019	PROYEK AIR LIMBAH JAKARTA: Jepang Beri Pinjaman Rp4 Triliun	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat bakal membuka pelelangan proyek Sistem Pengolahan Air Limbah Jakarta atau Jakarta Sewerage System dalam waktu dekat.
11	Bisnis Indonesia (Halaman 9)	Selasa, 2 Juli 2019	KAWASAN INDUSTRI: Jatim Siapkan Lahan Pengembangan 31.784 Ha	Provinsi Jawa Timur akan terus mengembangkan area kawasan industri (KI) dengan luas potensi lahan 31.784 ha di sejumlah wilayah guna mengakomodasi kebutuhan investasi bidang manufaktur dalam beberapa tahun ke depan.
12	Bisnis Indonesia (Halaman 23)	Selasa, 2 Juli 2019	Berita Foto	Personel TNI bersama sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian tetap (huntap) bantuan Yayasan Budha Tzu Chi bagi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kelurahan Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/7).

Judul	Kekeringan Meluas	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Republika (Halaman 1)		
Resume	Luas lahan pertanian dan wilayah yang dilanda kekeringan akibat kemarau terus bertambah. Pasokan air sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan sawah para petani serta keberlangsungan hidup warga di daerah yang mengalami krisis air bersih.		

Kekeringan Meluas

● RIGA NURUL IMAN
IMAS DAMAYANTI

Warga terpaksa mencari air bersih ke hutan.

JAKARTA — Luas lahan pertanian dan wilayah yang dilanda kekeringan akibat kemarau terus bertambah. Pasokan air sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan sawah para petani serta keberlangsungan hidup warga di daerah yang mengalami krisis air bersih.

Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, luas kekeringan lahan pertanian mencapai 2.563 hektare pada awal Juli ini. Pada pertengahan Juni lalu, hanya ada 688 hektare lahan yang berstatus terancam kekeringan.

Menurut Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, jumlah sawah yang terdampak kekeringan berpotensi bertambah seiring masih panjangnya musim kemarau. "Saat ini ada 4.373 hektare lahan yang terancam kekeringan," kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi Sudrajat, Senin (1/7).

Dari 2.563 hektare lahan yang kekeringan, seluas 1.022 hektare lahan berkategori kekeringan ringan, kekeringan sedang 1.016 hektare, dan kekeringan berat seluas 422 hektare. Jika kekeringan terus terjadi, kata dia, tingkatan kerusakan akan meningkat dari ringan ke sedang dan sedang ke berat.

Lahan terdampak kekeringan kebanyakan tersebar di selatan Sukabumi yang rata-rata sawahnya tadah hujan. Pemerintah disebut sudah memberikan bantuan berupa pom-

panisasi untuk daerah yang masih terdapat sumber air.

Walau kekeringan melanda, produksi beras di Sukabumi masih surplus. Dia menjelaskan, luas panen pada Juni 2019 mencapai 18.459 hektare dengan produksi beras sebesar 43.064 ton. Adapun kebutuhan mencapai 21.038 ton sehingga terdapat surplus 22.026 ton.

Luas lahan pertanian yang terdampak kekeringan juga terus meluas di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Petani pun merugi karena banyak yang tidak mengajukan asuransi tani.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Pemkab Magetan Eddy Suseno mengatakan, total luas lahan yang ditanami padi pada musim kemarau pertama (MK 1) mencapai 21 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, terdapat 849,2 hektare lahan pertanian yang mengalami kekeringan dan terancam puso. "Jumlah itu meluas dari sebelumnya yang hanya 167 hektare," kata dia.

Ia sangat menyayangkan karena tidak semua lahan terdampak kekeringan diasuransikan. Dengan demikian, petani tidak bisa melakukan klaim atas gagalnya panen. "Kami masih menunggu data dari perusahaan asuransi berapa petani yang telah mengajukan klaim asuransi usaha tani padi (AUTP)," katanya.

Guna mengatasi kekeringan di Magetan, Pemkab Magetan tak hanya mengandalkan hujan dan waduk irigasi, tetapi juga menambah pemasangan sumur pompa bagi petani. Pemasangan sumur pompa diutamakan untuk daerah yang jauh dari

sistem irigasi.

Selain lahan pertanian, wilayah terdampak kekeringan juga meluas. Di Cilacap, Jawa Tengah, ada 17 desa terdampak yang tersebar di tujuh kecamatan. "Jumlah warga di 17 desa yang terdampak kekeringan mencapai 7.123 keluarga atau 21.660 jiwa," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Tri Komara Sidhy.

Kekeringan membuat air bersih sulit didapat. Hal tersebut seperti terjadi di Kampung Watu Lawang dan Pasir Salam, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Warga setempat harus menempuh perjalanan cukup jauh dengan menyusuri hutan untuk mendapatkan air bersih guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Musim kemarau menyebabkan sumur warga kering.

Kemarin, sejumlah warga setempat tampak berjalan menyusuri hutan untuk mencari genangan sumber mata air. Hayubi, salah seorang warga Watu Lawang, mengaku terpaksa harus berjalan hingga satu jam dari rumahnya agar bisa mendapatkan air bersih untuk memenuhi keperluan mandi dan cuci. Sudah dua pekan kekeringan melanda wilayahnya.

"Ya, beginilah kalau lagi musim kemarau, air susah. Dari kemarin bersama warga rebutan air, antre isi jeriken, karena sumbernya memang ini satu-satunya untuk warga empat kampung," ujar dia.

Hasanah, seorang warga lainnya, menjelaskan, ia bersama yang lainnya rela mencuci dan mengambil air pada waktu siang supaya tidak datang bersamaan. "Kalau sore atau pagi itu ramai, sementara genangan sumber

air juga sedikit, makanya saya pilih siang," katanya.

Lurah Gerem, Denny Yuliandhi, mengaku sudah menyurati sejumlah instansi terkait agar dapat memberikan air bersih. Namun, bantuan air bersih tak kunjung datang. "Kami minta ke BPBD Cilegon, tapi diberi air kemasan, makanya kami sekarang minta ke PDAM semoga sesuai harapan," ujarnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim sudah melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana kekeringan dengan mengoptimalkan jaringan irigasi di sekitar lahan terdampak. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy mengatakan, pompanisasi sudah dijalankan sejak empat tahun terakhir.

"Sudah kita instruksikan kepada petani dan kelompok tani untuk mengoptimalkan pompa yang kami berikan. Kita instruksikan mereka memompa air dari sungai terdekat," kata Sarwo kepada *Republika*.

Sementara untuk lahan kering yang berlokasi jauh dari sungai, petani dapat memanfaatkan sumber air permukaan. Dia menjelaskan, sumber air permukaan perlu diukur terlebih dahulu tingkat kemampuannya untuk kemudian diinventarisasi ke beberapa lokasi titik lahan yang terdampak kekeringan.

Dalam kurun empat tahun terakhir, Kementan mengalokasikan sekitar 200 ribuan unit pompa dengan berbagai jenis ukuran. Wilayah-wilayah terdampak kekeringan lahan yang belum memiliki pompa diimbau segera mengajukan kepada dinas pertanian di wilayah masing-masing.

■ antara ed: satria kartika yudha

Indepth
KLHK Susuri Titik Panas

Hlm-9

Judul	Pembebasan Lahan Tol Japek II Selatan Dikebut	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Republika (Halaman 4)		
Resume	PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) mempercepat tahapan pelaksanaan pembangunan jalan Tol Jakarta Cikampek (Japek) II Selatan. Saat ini, perusahaan tersebut telah membahas ganti rugi lahan, imbas dari proyek tersebut.		

Pembebasan Lahan Tol Japek II Selatan Dikebut

● ITA NINA WINARSIH

PURWAKARTA — PT Jasamarga Japek Selatan (JJS) mempercepat tahapan pelaksanaan pembangunan jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan. Saat ini, perusahaan tersebut telah membahas ganti rugi lahan, imbas dari proyek tersebut.

Ketua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Jalan Tol Japek Selatan II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Purwakarta, Nurbaiti, mengatakan, musyawarah mengenai ganti rugi lahan sudah dilakukan pada pertengahan Juni yang lalu. Saat ini, pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol ini, sudah memasuki tahapan pelaksanaan.

"Di Purwakarta saja dari 288 bidang lahan yang kita butuhkan sudah 177 bidang yang kita beli. Saat ini, tahapan pembelian lahan kita kebut," ujar Nurbaiti, Senin (1/7). Pihaknya juga mengatakan, pekerjaan konstruksi tol sudah berjalan sejak Mei lalu. Sementara itu, terkait lahan, 45 persennya merupakan tanah milik pemerintah.

Nurbaiti memerinci, yakni lahan yang dikelola Jasa Marga merupakan milik Kementerian PUPR dan sudah berizin. Namun, ada pula lahan milik Perhutani. Meski demikian, lanjut Nurbaiti, khusus lahan Perhutani tersebut pihaknya sedang menempuh proses perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Direktur Utama PT JJS, Dedi Krisnariawan Sunoto, mengatakan, target penyelesaian untuk pembebasan lahan sampai dengan 2020 mendatang. Akan tetapi, saat ini tahapan pembebasan lahan ini terus dikebut.

Supaya pembangunan infrastruktur ini bisa selesai sesuai target. "Pembangunan Tol Japek II Selatan ini, ditargetkan selesai 2021 mendatang," kata Dedi, Senin.

Terkait Tol Japek II Selatan tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta akan membangun *interchange* atau gardu tol baru. Tol yang panjangnya mencapai 62 kilometer ini akan terbentang dari Jatiasih (Bekasi) hingga Sadang (Purwakarta). Dengan demikian, penambahan gardu tol dibutuhkan untuk kelancaran arus kendaraan.

Kepala Bappeda Kabupaten Purwakarta, Aep Durohman, mengatakan, saat ini telah ada pemaparan mengenai rencana pembangunan Tol Japek II Selatan.

"Tetapi, dengan adanya tol baru ini, kita juga mengusulkan supaya ada penambahan gerbang tol, yaitu *interchange* simpang susun Cicadas," ujar Aep, kepada *Republika*, Senin. Dengan adanya gerbang tol baru ini, diharapkan bisa memberikan dampak positif. Terutama, untuk investasi.

Aep mengatakan, saat ini sudah ada tiga gerbang tol di wilayah Purwakarta, yakni GT Cikopo (Cikampek), GT Sadang, dan GT Ciganea (Jatiluhur). Dengan dibukanya akses jalan tol serta adanya *interchange* baru ini, terutama di Desa Cicadas, Kecamatan Babakan Cikao, diharapkan bisa membuka akses dan memberikan keuntungan bagi Purwakarta khususnya dari sisi investasi, pariwisata, dan daya saing.

"Sisi pengembangan wilayah, rencana jalan tol tersebut akan membuka konektivitas ke depan khususnya untuk Purwakarta sendiri," ujar Aep.

Pembanguan jalan Tol Japek II Selatan ini, akan melintasi Purwakarta dengan sekitar tujuh kilometer. Adapun wilayah yang terkena imbasnya, ada empat desa di Kecamatan Babakan Cikao. Empat desa itu, yakni Cigelam, Hegarmanah, Cicadas, dan Desa Cilangkap. ■ **ed:** nora azizah

Judul	Hunian di Atap Mal Terobosan Kreatif	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 15)		
Resume	Konsep hunian di atas gedung atau atap bangunan lain dinilai sebagai terobosan kreatif. Yang penting konsumen paham bahwa status kepemilikannya, yaitu strata title, bukan rumah tapak.		



ANTARANA/NOVA WAHYUDI

ALTERNATIF MEMBANGUN RUMAH: Perumahan Cosmo Park yang berada di atap mal Thamrin City, Jakarta, Rabu (26/6). Hunian di atas gedung diprediksi tidak menjadi tren dalam bisnis properti karena masyarakat diperkirakan tidak berminat dengan konsep semacam itu dan lebih memilih perumahan di lahan darat.

Selain menghemat tanah, pengembangan konsep town house yang dimodifikasi seperti itu menawarkan pemandangan sangat indah.

Hunian di Atap Mal Terobosan Kreatif

FETRY WURYASTI
fetry@mediaindonesia.com

KONSEP hunian di atas gedung atau atap bangunan lain dinilai sebagai terobosan kreatif. Yang penting konsumen paham bahwa status kepemilikannya, yaitu *strata title*, bukan rumah tapak.

Itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Eka Jaya. Ia menanggapi tentang perumahan di atas pusat perbelanjaan yang ramai diperbincangkan publik.

Warganet dengan akun @shahrirbahar1 mencitakan foto udara perumahan mewah Cosmo Park di area atap Mal Thamrin City, Jakarta Pusat. Dalam cicitan yang diunggah pada 25 Juni itu, ia mengaku heran tentang hal tersebut.

Bambang berpendapat bahwa rumah yang disoal sebagian masyarakat itu sebagai pengembangan konsep *town house* yang dimodifikasi di atap. Selain menghemat tanah, hunian seperti itu me-

nawarkan pemandangan sangat indah. "Ini satu solusi kreatif yang harus kita berikan apresiasi," ujar Bambang kepada *Media Indonesia*, Senin (1/7).

Ia menggarisbawahi hunian mewah di atas bangunan lain seperti kasus itu sepatutnya tidak perlu dipersoalkan selama koefisien lantai bangunan (KLB) dan peruntukannya masih sesuai dan tidak menyalahi apa pun. KLB merupakan angka persentase perbandingan antara seluruh luas lantai bangunan yang dapat dibangun dan luas lahan tersedia.

Rumah tersebut dapat dianggap sebagai apartemen *duplex* terdiri atas dua lantai. Untuk diketahui, apartemen *duplex* ialah jenis akomodasi yang terletak di lantai tertinggi di kompleks apartemen.

"Secara spesifik memang belum kalau itu dianggap rumah. Tapi kalau kita anggap memanfaatkan KLB lebih, kita bisa anggap sebagai *penthouse* dengan kelengkapannya, seperti kolam renang dan *fitness centre*," terangnya.

"Jadi, *point of view*-nya anggap bagian dari proyek, bukan rumah tapak, tapi

anggap rumah susun."

Permudah pengembang

Bila pemerintah perlu melakukan perubahan regulasi terkait, Bambang menyarankan pengaturan harus menyesuaikan perkembangan zaman. Artinya, jangan sampai aturan baru dijadikan alat mempersulit pengembang.

"Jangan lupa REI merupakan mitra pemerintah dalam pengembangan kawasan dan pemenuhan kebutuhan warganya. Kita harus bekerja bahu-membahu menciptakan sinergi positif untuk bangsa," tandas Bambang.

Untuk diketahui, ratusan rumah mewah di atap gedung Thamrin City diberi nama Cosmo Park. Posisinya terletak di lantai 10 gedung itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Benny Agus Chandra mengatakan, status kepemilikan rumah mewah tersebut seperti apartemen, yaitu *strata title* dan sudah mengantongi izin. Perumahan Cosmo Park sudah mengantongi

izin mendirikan bangunan (IMB) yang dikeluarkan Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan DKI Jakarta dengan nomor surat 11492/IMB/2007 dan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan pertama kali pada 2010.

Pengembang mengajukan izin hunian untuk pembangunan kawasan Thamrin City. Izin ini, menurut Benny, sudah satu kesatuan dengan pembangunan kompleks perumahan Cosmo Park tersebut.

Proses pembangunan perumahan Cosmo Park sudah dilakukan sebelum era Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012-2014. Menurutnya, izin yang dikantongi Cosmo Park seperti izin apartemen yang bergabung dengan pusat perbelanjaan.

Pengamat properti dari Indonesia Properti Watch (IPW), Ali Trangganda, mengimbuhan hunian di atas gedung diprediksi tidak menjadi tren dalam bisnis properti. Dalihnya, masyarakat diperkirakan tidak berminat dengan konsep semacam itu dan lebih memilih perumahan di lahan darat. (Ant/S-3)

Judul	Hunian Dekat Transportasi Publik Lebih Diminati	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 15)		
Resume	Warga Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek) lebih suka memilih hunian berdekatan dengan akses transportasi public, baik itu lintas rel terpadu (LRT) maupun Trans-Jakarta.		



ANTARA/RAISAN AL FARISI

PERUMAHAN MILENIAL: Kawasan perumahan di Cinunuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/6). Kementerian Pu-Pera bersama asosiasi pengembang, akademisi, dan *stakeholders* lain tengah menyiapkan skema program perumahan bagi generasi milenial yang saat ini diperkirakan terdapat 81 juta jiwa melalui program sejuta rumah.

Hunian Dekat Transportasi Publik Lebih Diminati

WARGA Jakarta dan sekitarnya (Bodetabek) lebih suka memilih hunian berdekatan dengan akses transportasi publik, baik itu lintas rel terpadu (LRT) maupun Trans-Jakarta.

"Ini bisa dilihat pengembangan hunian tapak kami yang berlokasi di Jalan Raya Kranggan, Cibubur, perbatasan Jakarta dan Bekasi yang laris dibeli masyarakat," kata pengembang Premier Estate Aditya Wisnu Wardana di Jakarta, Minggu (30/6).

Mengingat hal itu, Aditya yang juga direktur proyek di Jakarta mengaku optimistis daya beli konsumen masih tinggi. Aditya mengakui optimisme itu juga melihat kunjungan masyarakat ke Premiere Estate 3 yang menunjukkan daya

beli konsumen masih tinggi, ditambah prospek ekonomi Indonesia ke depannya sangat cerah.

"Proyek kami merupakan kerja sama PT Premier Kualitas Indonesia (Premier) dengan PT Biwel Sukses Bersama yang memang melihat prospek cerah dari ekonomi di Indonesia ke depannya," kata Aditya.

Dia menegaskan, respons pasar terhadap Premier Estate 3 di luar perkiraan. Sedikitnya ada 370 nomor urut pemesanan (NUP) untuk membeli hunian di kawasan ini. "Tentunya ini membuat kami semakin yakin dengan produk properti kami," paparnya.

President Director Premier Tommy Wong mengatakan, proyek Premier Estate

3 ini dibangun di atas lahan seluas 9,2 hektare (ha). Khusus untuk hunian, luas lahannya mencapai 7,5 ha, sisanya yang 1,7 ha diperuntukkan menjadi kawasan pengembangan komersial, apartemen, dan *mixed use*.

Developer menawarkan 364 unit rumah dengan *rate* empat tipe rumah yang bisa menjadi pilihan konsumen, yakni Antibes, Besancon, Cholet, dan Deaux. Semua tipe rumah yang memiliki dua lantai itu ditawarkan mulai Rp795 juta sampai Rp2,3 miliar.

Perumahan itu dapat diakses melalui tiga tol, yaitu tol JORR (Jakarta Outer Ring Road) *exit* Jatiwarna, tol Jagorawi *exit* Cibubur, dan tol Cimanggis-Cibitung *exit* Cibubur yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.

Selain itu, Premier Estate 3 ini dekat dengan transportasi massal, seperti jalur LRT dan juga jalur bus Trans-Jakarta. (Try/Ant/S-2)

Judul	Banyumas Cerdas Atasi Krisis Air	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Media Indonesia (Halaman 18)		
Resume	Musim kering tidak membuat warga di sejumlah desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, keder. Pemerintah kabupaten sudah menggelar program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat alias pamsimas.		

Banyumas Cerdas Atasi Krisis Air

Satu pamsimas dibangun dengan dana Rp350 juta. Anggaran berasal dari pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

LILIEK DHARMAWAN
lilik@mediaindonesia.com

MUSIM kering tidak membuat warga di sejumlah desa di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, keder. Pemerintah kabupaten sudah menggelar program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat alias Pamsimas.

"Program ini menjadi salah

satu solusi jangka panjang menghadapi krisis air bersih. Sampai saat ini sudah ada 154 desa atau 30 ribu kepala keluarga yang bisa mengakses Pamsimas," papar Kabid Penyehatan Lingkungan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Banyumas, Kuat Sudarso, kemarin.

Tahun ini terus diperluas. "Pamsimas akan dibangun di 17 desa," lanjutnya.

Satu pamsimas, sambung

Kuat, dibangun dengan dana Rp350 juta. Anggaran berasal dari Pemkab dan pemerintah desa. "Dinas bertugas membuat sumur dalam dan infrastruktur lain, sedangkan desa mengarahkan lokasi."

Kemarau juga tidak menciutkan nyali petani di Gresik, Jawa Timur. Mereka justru mengawalinya dengan mengolah lahan, kemarin.

"Kami biasa mengolah lahan saat kemarau. Ini persiapan untuk menghadapi musim tanam berikutnya," ungkap Mat Rokim, petani Desa Pantenan, Kecamatan Panceng.

Pengolahan dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya, agar gulma yang

Pamsimas membantu warga menghadapi kemarau. Setiap tahun jumlah desa terdampak terus berkurang.

tumbuh pada musim sebelumnya bisa dibasmi dengan tunas sehingga saat awal musim penghujan petani bisa langsung menanam jagung.

Di Sukabumi, Jawa Barat, Kepala Gudang Bulog Pasirhalang, Saepulloh, memastikan

stok beras di gudangnya dalam kondisi aman. "Stok sudah mencapai 3.500 ton, sesuai kapasitas gudang."

Ia menurunkan stok beras yang ada di gudang digunakan sebagai cadangan pemerintah. Sewaktu-waktu beras bisa digunakan ketika dibutuhkan.

Kebakaran hutan

Di sisi lain, dalam menghadapi kemarau, Kalimantan Tengah mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan. Mereka menyiapkan 4 posko di 4 daerah, yaitu Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, dan Palangka Raya.

"Keempat daerah itu berpotensi kejadian kebakaran la-

han dan hutan. Banyak wilayah merupakan lahan gambut sehingga rentan kebakaran," kata Komandan Satgas Karhutla Kalteng Kolonel Arm Saiful Rizal.

Sudah dua pekan wilayah Kalteng hadapi kemarau. Kebakaran hutan dan lahan mulai terjadi di sejumlah titik.

Saat ini, imbuh Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kalteng Mofit Saptono, terus digelar patroli. "Kami bergerak cepat melakukan pemadaman jika ada kebakaran."

Dari Belitung dilaporkan, kebakaran hutan dan lahan sudah mulai muncul. Kepala BPBD Bangka Belitung Mikron Antariksa mengaku sudah ada 5

titik di Bangka, Bangka Barat, dan Bangka Selatan, yang trun-cul. "Kami sudah mengantisipasi dengan menyiapkan 25 personel di setiap BPBD kabupaten."

Sampai kemarin, kekeringan juga terus meluas di Bangka Belitung, Klaten, Bantul, dan Tasikmalaya. Pemerintah kabupaten berusaha membantu warga dengan meluncurkan sejumlah program.

Di Klaten, misalnya, Pemkab membangun sumur dalam dengan menggunakan dana dari pemerintah pusat dan APBD kabupaten. Pembuatan sumur dalam diprioritaskan di daerah tadah hujan, seperti Bayat, Cawas, dan Gantiwarno. (YK/BB/SS/RF/JS/AU/AD/YH/HK/N-2)

Judul	Memindahkan Ibukota	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 7)		
Resume	Wacana pemindahan ibukota Indonesia muncul kembali dan pemerintah telah melakukan studi yang komprehensif, khususnya dari aspek infrastruktur fisik.		

Memindahkan Ibu Kota

Iwan Gardono Sujatmiko
Sosiologi, Dosen FISIP Universitas Indonesia

Wacana pemindahan ibu kota Indonesia muncul kembali dan pemerintah telah melakukan studi yang komprehensif, khususnya dari aspek infrastruktur fisik.

Sejala ini terdapat tiga pilihan menurut pemerintah (Bappenas). Pertama, tetap di Jakarta, tetapi ada listrik khusus. Kedua, ke wilayah dekat Jakarta (50-70 km). Ketiga, ke luar Jakarta.

Saat ini seperti pilihan ketiga yang akan dipilih dengan fokus awalnya ke Kalimantan Tengah dan sekarang ke Kalimantan Timur. Pertanyaan strategis-nasional adalah apakah alasan pemindahan yang disampaikan kepada publik cukup komprehensif? Apakah ada aspek yang belum dibahas?

Pembahasan berikut menunjukkan bahwa alasan yang ada kurang lengkap dan terdapat aspek militer, sosiologis, dan sejarah sebagai masukan untuk pembahasan masalah pemindahan ibu kota.

Enam alasan pemindahan

Selain tiga pilihan di atas, terdapat enam alasan yakni: (1) pengurangan beban Jakarta dan Jabodetabek, (2) mendorong pemerataan ke arah timur Indonesia, (3) mengubah pola pikir Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, (4) memiliki ibu kota yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan, dan penghayatan pada Pancasila, (5) pemerintah pusat yang efisien dan efektif, dan (6) ibu kota yang *smart green*, dan *beautiful* serta meningkatkan daya saing regional dan internasional.

Dari keenam alasan di atas terlihat bahwa alasan pertama merupakan alasan pendorong untuk pindah dan alasan kedua sampai keenam membahas po-

tensi dampak positif dari ibu kota baru tersebut. Berikut ini akan dibahas masukan untuk keenam alasan tersebut.

Pertama, pemindahan sebanyak 195.500 orang aparatur sipil negara (ASN) serta 25.660 anggota TNI dan Polri dari 900.000 ASN pusat (sekitar 1,2 juta jika dengan keluarganya) dari Jakarta tidak akan mengurangi secara signifikan beban Jakarta yang berpenduduk 10,5 juta orang (BPS, 2018) pada malam hari dan pada siang hari bertambah sekitar 2 juta orang.

Demikian pula beban penduduk di Pulau Jawa tidak akan berkurang secara signifikan dengan dibangunnya ibu kota baru di luar Pulau Jawa. Terkait dengan hal ini dapat saja ada kesan bahwa pembangunan ibu kota baru merupakan tindakan meninggalkan keruwatan Jakarta. Sebagai perbandingan, Tokyo melihat keruwatan sebagai tantangan yang diatasi dengan melakukan reformasi kota secara komprehensif.

Selain itu, jika pindah ke Kalimantan akan terlalu jauh karena jarak udara Jakarta ke Palangkaraya dan Samarinda sekitar 901 km dan 1.308 km dan dipisahkan oleh lautan. Sebagai perbandingan, jarak ibu kota lama dan baru di Australia, Brasil, Malaysia, Korea Selatan, Myanmar, dan semuanya berada dalam satu pulau dan berjarak kurang dari 1.000 km.

Ibu kota lama dan baru yang berbeda pulau adalah Turki (1923) dan jarak Ankara dengan Istanbul adalah 351 km dan dipisahkan oleh Selat Bosporus (jarak antara 700 meter sampai 3.500 meter) serta terdapat jembatan dan terowongan bawah selat.

Saat ini teori-teori pemindahan ibu kota membahas penyebabnya seperti masalah lingkungan, bencana alam, infrastruktur fisik yang tidak memadai dan jumlah penduduk yang terlalu banyak. Faktor politik dan perang terjadi pada Indonesia ketika ibu kota pindah sementara ke Yogyakarta, Bukittinggi, dan Bireuen. Demikian juga pemindahan ibu kota dapat mengurangi secara

signifikan konflik sosial dengan kekerasan ataupun non-kekerasan (Potter, 2017).

Teori lain menekankan faktor elite dan pembangunan bangsa pada era pasca-kolonial (Pakistan) dan pasca-Soviet (Kazakhstan) (Schatz, 2003). Selain itu terdapat pula teori bahwa ibu kota yang terisolasi di negara otoriter cenderung rendah tata kelolanya karena lemahnya protes sosial, seperti kasus pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon (Rangon) ke Naypyitaw (Campañe *et al.*, 2013).

Kedua, pemerataan ke Indonesia bagian timur dan luar Jawa dapat dan telah dilakukan dengan kebijakan pemerataan pembangunan. Saat ini pemerataan pembangunan dengan otonomi daerah, kredit usaha rakyat (KUR), infrastruktur fisik, dan dana desa telah memajukan daerah di Indonesia.

Jika ada peningkatan desentralisasi kewenangan perizinan dan rencana pembangunan enam metropolitan baru oleh pemerintah akan dapat memajukan wilayah luar Jawa. Namun, pemerataan pembangunan sumber daya alam (SDA) masih kurang inklusif dan saat ini menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada sekitar 50 persen dari 10.000 izin tambang tak lengkap dan jelas.

Dalam hal ini perlu melibatkan BUMDes atau koperasi desa dan perlu memberikan saham kepada komunitas pertaniannya (lihat "Konflik dan Keadilan Sosial," Kompas, 2/5/2012). Inklusi komunitas ini terkait dengan pemikiran demokrasi ekonomi Bung Hatta dan pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 33 dan sila Keadilan Sosial, khususnya SDA.

Ketiga, mengubah pola pikir (*mindset*) pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris sangat terkait dengan pembahasan alasan kedua di atas. Jika SDA lebih bermanfaat pada rakyat banyak, akan ada realitas baru dan pola pikir Indonesia sentris akan meningkat. Demikian pula, adanya kawasan pembangunan sejumlah kabupaten dan provinsi, des-



tinasi wisata dan pelabuhan udara luar Jawa akan mengurangi *mindset* Jawa sentris.

Selain itu, pada era masyarakat informasi, penyebaran dan akses pendidikan dan perdagangan daring (*online*) akan mengurangi peran batas geografis dan dapat meningkatkan Indonesia sentris. Dalam ranah maya (*virtual*), untuk aspek tertentu daerah pinggir (di tingkat nasional bahkan global) dapat menjadi pusat.

Keempat, memiliki ibu kota baru yang merepresentasikan identitas bangsa, kebinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila memerlukan indikator yang lebih jelas mengenai ketiga konsep tersebut sehingga dapat diketahui potensi pencapaiannya dibandingkan dengan Jakarta atau daerah lainnya.

Kelima, pemindahan ibu kota tidak otomatis menghasilkan pemerintah pusat yang efisien dan efektif. Hal yang lebih penting adalah peningkatan tindakan anti-KKN oleh aparat pusat (kejaksaan, Polri, dan pengadilan) yang berada di provinsi dan kabupaten guna meningkatkan efektivitas pemerintah daerah. Keadaan ini dapat meningkatkan legitimasi presiden dan Mahkamah Agung.

Keenam, memiliki ibu kota dengan konsep *smart green*, dan *beautiful city* memang lebih

dimungkinkan di ibu kota baru di timur Jakarta. Namun, Kalimantan Tengah mempunyai masalah karena lahan gambut tropis sangat rentan (Bambang Setiadi, Kompas, 9/5/2019). Selain itu, Kalimantan Tengah mengalami bencana lingkungan dan sosial, seperti deforestasi serta dampak negatif tambang legal dan ilegal.

Demikian pula ibu kota baru tidak serta-merta dapat meningkatkan daya saing dan yang perlu dikembangkan adalah lembaga dan infrastruktur sosial, seperti pendidikan dalam keluarga dan sekolah maupun akselerasi peningkatan kompetensi warga, lembaga pendidikan dan perusahaan agar mampu bersaing di tingkat regional dan internasional.

Aspek militer, sosiologis, dan sejarah
Pembahasan berikut menunjukkan bahwa aspek militer, sosiologis, dan sejarah masih belum dibahas secara jelas dan perlu mendapat masukan. Di lihat dari aspek militer, apakah rencana pemindahan ibu kota akan disertai Mabes TNI ini akan sejalan dengan Buku Putih Kementerian Pertahanan 2015 dan Rencana Strategis TNI yang ada?

Analisis Geografi Pertahanan tentang "Lima Aspek Medan bagi Militer" menyimpulkan bahwa Jakarta masih lebih banyak positifnya dibandingkan dengan Jonggol atau Palangkaraya (Makmur Supriyatno, Jurnal Pertahanan Vol.3, 2013). Selain itu terdapat analisis yang membahas pentingnya posisi ibu kota dan gelar pasukan untuk menjaganya (Fahmi AP Pane, Kompas, 14/5/2019). Sementara itu, aspek sosiologis ibu kota baru mencakup adanya pendatang baru dengan berbagai kebinekaan sosial budaya dapat menghasilkan hubungan sosial, yakni kerja sama, kompetisi, maupun konflik. Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk tahun 1957 agar suku Dayak menjadi mayoritas karena sebelumnya mereka berada di Kalimantan Selatan yang mayoritasnya adalah suku Banjar. Namun, dalam perkembangan banyak pendatang di sana dan menghasilkan persaingan ekonomi dan gesekan budaya serta konflik horizontal pada 1996-1997 dan tahun 2001 di Sampit yang menyebar ke tempat lain di Kalimantan Tengah.

Demikian juga di Tarakan, Kalimantan Timur, pada 2010 pernah terjadi konflik horizontal antarsuku walaupun Tarakan sekarang telah menjadi Provinsi Kalimantan Utara. Jika dilihat dari struktur vertikal maka berbagai data dan analisis menunjukkan bahwa Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang kaya SDA masih didominasi oleh korporasi, elite luar provinsi dan elite lokal dan telah menghasilkan KKN di eksekutif dan legislatif. Kesejahteraan sosial ini menghasilkan kecemburuan serta konflik tertutup dan terpendam yang mudah menjadi konflik terbuka.

Selain aspek militer dan sosiologis, aspek sejarah juga menjadi penting dalam rencana pemindahan ibu kota. Jakarta—sebelumnya Batavia—berasal dari Jayakarta (Kesultanan Banten) dan sebelumnya Sunda Kalapa (Kerajaan Pajajaran), tetapi dalam perkembangannya Jakarta menjadi kota perjuangan dalam membangun identitas kebangsaan Indonesia. Di Jakarta terjadi peristiwa strategis

yang menghasilkan memori kolektif dan modal sejarah bangsa Indonesia seperti Kebangkitan Nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, lahirnya Pancasila 1945, Piagam Jakarta 1945, Proklamasi 1945, Mosi Integral 1950, Kesaktian Pancasila 1965, dan Reformasi 1998.

Beberapa bangunan sejarah kebangsaan telah menjadi ikon Jakarta, seperti museum-museum kebangsaan dan Monumen Nasional sebagai simbol kemerdekaan yang berada di Lapangan Merdeka dan menjadi tempat Nashak Proklamasi dan Bendera Pusaka Merah Putih.

Terkait dengan hal ini penting untuk diketahui UU Nomor 10 Tahun 1964 (tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta) yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dengan persetujuan DPR GR yang dalam pertimbangannya menyatakan: "Jakarta Raya merupakan kota pencetus proklamasi kemerdekaan serta pusat penggerak segala aktivitas revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia serta yang telah menjadi ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa alasan pertama pemindahan ibu kota yang masih parsial dan terbatas pada sebagian ASN tidak akan secara signifikan mengurangi keruwatan Jakarta. Selain itu, alasan kedua sampai keenam, yakni akan adanya ibu kota baru, tidaklah serta-merta akan meningkatkan pembangunan daerah walaupun dapat menghasilkan sebuah kota baru yang *smart green*, dan *beautiful*.

Dengan kata lain, potensi dampak positif dari ibu kota baru sebenarnya telah dan akan dapat terjadi karena faktor-faktor di luar adanya ibu kota baru. Terkait hal ini, perlu melihat gambar besar pemindahan ibu kota Indonesia yang butuh masukan dari berbagai pihak dan beragam disiplin ilmu agar Presiden dan DPR dapat memutuskan kebijakan strategis ini dengan setepat-tepatnya.

Judul	Mewujudkan 10 Bali Baru dan KEK	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 7)		
Resume	Beberapa tahun terakhir, geliat industri pariwisata kian bergairah, tercermin antara lain dari peningkatan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).		

Mewujudkan 10 Bali Baru dan KEK

Hiramsyah Sambudhy Thaib

Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Bali Baru Kementerian Pariwisata dan Ketua Kelompok Kerja Pembentukan KEK Pariwisata

Beberapa tahun terakhir, geliat industri pariwisata kian bergairah, tercermin antara lain dari peningkatan kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB).

Faktor pemicunya, antara lain, meningkatnya jumlah masyarakat berpenghasilan menengah, berkembangnya internet yang sangat berperan mendorong tumbuhnya tempat wisata baru, dan tren tiket murah penerbangan yang ikut meramalkan industri pariwisata.

Menurut riset World Travel and Tourism Council (WTTC) di 185 negara, PDB pariwisata menyumbang 10,4 persen dari total PDB dunia, yaitu 8 triliun dollar AS. Pertumbuhan PDB pariwisata naik 3,9 persen pada 2018, menempatkannya di posisi kedua penyumbang PDB terbesar setelah manufaktur yang 4,0 persen. Dengan pertumbuhan 3,9 persen ini, sektor pariwisata tumbuh di atas rata-rata PDB dunia yang hanya 3,2 persen. AS, China, Jepang, Jerman, dan Inggris adalah lima pasar terbesar pada 2018. Secara kolektif, kelimanya merepresentasikan 47 persen PDB pariwisata dunia.

Indonesia juga mengalami pertumbuhan sangat pesat pariwisata, yakni 22 persen, lebih tinggi ketimbang rata-rata pertumbuhan pariwisata dunia dan ASEAN yang 6,4 dan 7 persen.

Memang jika dibandingkan dengan Thailand yang lebih dulu bergerak cepat beberapa dekade yang lalu, Indonesia masih belum apa-apa. PDB pariwisata Indonesia tahun 2018 sebesar 58 miliar dollar AS, sementara Thailand 95 miliar dollar AS. Devisa yang disumbangkan pariwisata untuk Indonesia sekitar 17,5 miliar dollar AS dan Thailand 62 miliar dollar AS.

Indonesia dengan potensi alam dan budaya sangat beragam, bahkan bisa dibilang salah satu yang terbaik di dunia seharusnya mampu meraih devisa pariwisata dua kali lipat dari Thailand, atau setidaknya menyamai Thailand.

Presiden Jokowi telah menetapkan pariwisata sebagai *leading sector*. Komitmen Presiden terhadap sektor pariwisata

dituangkan pada visi 2019-2024. Dalam debat capres, Jokowi mengatakan akan melanjutkan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di sejumlah daerah sehingga diharapkan akan berimbas pada ekonomi daerah melalui peningkatan produksi barang kerajinan daerah itu.

Sumber baru devisa dan investasi

Sejalan dengan itu, Menteri Pariwisata telah memiliki strategi untuk membangun 100 KEK pariwisata. Pembangunan akan mencontoh kesuksesan Nusa Dua, Bali, sebagai lokomotif pariwisata di Bali dan Indonesia. KEK pariwisata direncanakan jadi solusi terbaik dalam mengembangkan perekonomian daerah. Melalui KEK, investasi di pariwisata akan lebih menarik karena adanya berbagai kemudahan, seperti perizinan, insentif fiskal, sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta dukungan pembangunan infrastruktur.

Insentif atau fasilitas dan kemudahan untuk investor berupa pengurangan PPh, pengurangan biaya PPh dan PPhnBM, keringanan bea masuk kepabeanan, dapat memiliki izin tinggal dalam bentuk hunian atau properti di KEK, pengurangan Pajak Pembangunan I dan Pajak Hiburan, kemudahan pengesahan dan perpanjangan rencana kerja asing di KEK, kemudahan perpanjangan izin tinggal untuk negara asing, pemberian HGB untuk KEK yang diusulkan badan usaha swasta dan kemudahan perpanjangan mendapatkan izin prinsip dan izin usaha melalui PTSP.

KEK industri pariwisata adalah kawasan industri pariwisata yang sekurang-kurangnya terdiri atas enam jenis usaha pariwisata: (i) jasa makanan dan minuman; (ii) daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan; (iii) penyediaan akomodasi; (iv) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; (v) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran; dan (vi) spa; yang seluruhnya saling terkait dan ter-

integrasi sebagai tujuan wisata. Pengembangan KEK pariwisata harus diikuti pembangunan sejumlah infrastruktur yang tak hanya berfokus di satu pulau saja, tetapi juga di pulau-pulau lain sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.

Dengan 34 provinsi yang ada, Indonesia sangat berpotensi membangun KEK dalam jumlah banyak. Pada tahap awal, KEK pariwisata akan dibangun di tujuan wisata yang termasuk dalam 10 Bali baru. Pengembangan 10 Bali Baru perlu dana Rp 500 triliun. Dari jumlah ini, 32 persen atau Rp 170 triliun ditargetkan dari investasi pemerintah dan 78 persen atau Rp 330 triliun dari investasi swasta (PMDN dan PMA).

Hingga saat ini, sudah ada empat KEK pariwisata di area 10 Bali baru, yaitu KEK Pariwisata Tanjung Lesung seluas 1.500 ha dan total investasi 4 miliar dollar AS, KEK Pariwisata Mandalika seluas 1.175 ha dan investasi 3 miliar dollar AS, KEK Pariwisata Morotai seluas 300 ha dan investasi 2,9 miliar dollar AS, dan KEK Pariwisata Tanjung Kelayang Belitung seluas 324 ha dan investasi 1,4 miliar dollar AS.

Penandatanganan komitmen investasi telah dilakukan untuk KEK Mandalika senilai Rp 28,63 triliun dan Kawasan Pariwisata Badan Otorita Danau Toba senilai Rp 6,1 triliun.

Selain keempat KEK tersebut, saat ini sedang diproses 12 KEK berikutnya. Tiga sudah dalam proses penetapan, yaitu KEK Pariwisata Tanjung Gunung, Sungai Liat, dan Singosari. Sementara sembilan lainnya masih dalam proses pengusulan dan diharapkan sudah ditetapkan dalam waktu dekat.

Dengan mulai siapnya KEK pariwisata pada 2019, ke depan diharapkan akan terjadi lagi pertumbuhan *double digit* investasi pariwisata. Pembangunan KEK pariwisata ini akan mampu menarik devisa melalui dua cara: dari devisa yang dibawa wisatawan mancanegara, dan dari investasi asing (PMA).

Realisasi investasi pariwisata pada 2018 mencapai 1.608,65

juta dollar AS, meliputi 40,76 persen (655,70 juta dollar AS) dari PMDN dan 59,24 persen (952,95 juta dollar AS) dari PMA. Realisasi investasi sektor pariwisata menyumbang 2,90 persen terhadap total realisasi investasi di Indonesia pada 2018, di luar migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, sewa guna usaha, dan industri rumah tangga.

Selain devisa, pembangunan KEK juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pada 2018 telah direalisasikan 2.668 proyek dari PMA dan 586 proyek dari PMDN. Proyek-proyek ini mampu menyedot 8.424 tenaga kerja pada proyek PMDN dan 19.574 pada proyek PMA.

Menteri Pariwisata juga telah mengusulkan sektor pariwisata sebagai *core economy* Indonesia. Untuk itu, pada 2020 pariwisata akan menjadi sektor prioritas utama untuk perolehan devisa. Caranya, dengan mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara. Untuk mencapainya, Kementerian Pariwisata pada 2018 telah menetapkan 10 program prioritas, yaitu (i) Digital Tourism (E-Tourism), (ii) Homestay, (iii) Air Accessibility, (iv) Branding, (v) Top 10 Origination, (vi) Top 3 Main Destination (15 Destination Branding), (vii) Develop 10 New Priority Tourism Destinations, (viii) Certified Human Resources in Tourism & Tourism Awareness Movement, (ix) Tourism Investment Growth, dan (x) Crisis Center Management.

"Country branding"

Sektor pariwisata juga dikenal sebagai *mother industry* karena bisa menjadi *huma* (*public relations*) dan cara promosi paling efektif (*country branding*) suatu negara. Citra suatu negara dapat tergambar dari industri pariwisatanya. Industri pariwisata yang baik akan memberikan kesan positif bagi negara. Sudah terbukti di banyak negara yang menjadikan sektor pariwisata sebagai ujung tombaknya, kemajuan sektor pariwisata akan menjadi lokomotif untuk menarik maju sektor-sektor lainnya.

Judul	Bali Seribu Tahun Muliakan Air	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Kompas (Halaman 9)		
Resume	Tradisi masyarakat Bali menghormati dan memuliakan air sudah berlangsung sekitar 1.000 tahun lalu. Kearifan lokal itu berlanjut terus-menerus hingga saat ini.		

KEARIFAN LOKAL

Bali Seribu Tahun Muliakan Air

DENPASAR, KOMPAS — Tradisi masyarakat Bali menghormati dan memuliakan air sudah berlangsung sekitar 1.000 tahun lalu. Kearifan lokal itu berlanjut terus-menerus hingga saat ini.

Keberadaan candi-candi tebing di sepanjang Tukad atau Sungai Pakerisan, seperti pertapaan dan Candi Gunung Kawi, merupakan situs-situs yang menjadi bukti nyata tradisi pengelolaan sumber daya air di Bali sejak dahulu kala yang masih utuh keadaannya sampai kini. Candi Gunung Kawi adalah lokasi petirtaan sekaligus pertapaan yang dibangun Raja Marakata tahun 1049-1077.

Seperti di Candi Gunung Kawi, di Pura Taman Ayun juga terdapat kolam luas yang menampung air untuk keperluan subak para petani setempat. Kolam ini diperkirakan sudah ada sejak abad ke-16.

"Di Pura Dalem Sinunggal (Beji atau mata air Pura Taman Ayun), warga setempat mengantisipasi potensi longsor dengan menanam pepohonan di kawasan itu. Pemuliaan tanaman ditandai dengan pemasangan kain-kain di pohon. Tujuan

mereka membuat bangunan-bangunan ini adalah menghindari kerusakan lingkungan. Kalau tak ada pura, warga mudah merusak atau mengubah," kata I Made Geria, Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, dalam diskusi terfokus riset arkeologi "Peradaban Bali dalam Pengelolaan Sumber Daya Air", Senin (1/7/2019), di Denpasar.

Namun, di sejumlah tempat di Bali terjadi degradasi kearifan lokal pengelolaan sumber daya air. Degradasi terkait aspek kendala ekonomi dan masuknya pemodal dari luar yang tak sesuai konsep konservasi. Kini kekuatan pertahanan tata kelola air di Bali seperti subak salah satunya adalah ideologi masyarakat. "Di beberapa daerah, meski sawah mereka telah hilang, mereka menjalankan ritual *mapag toya*," ucapnya.

Karena itu, Puslit Arkenas menggelar riset khusus terkait keberlangsungan pengelolaan sumber daya air di Bali. Diharapkan dengan pelibatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu, apa yang dilakukan dan diwariskan para leluhur di Bali tidak dimaknai sekadar sebagai *gu-*

gon tuhon (larangan-larangan) semata, tetapi juga memiliki landasan keilmuan.

Nana Mulyana, dosen Hidrologi dari Institut Pertanian Bogor, mengatakan, masyarakat Bali memiliki kemandirian air sejak abad ke-11. Itu merupakan kearifan lokal terbaik di Indonesia dalam tata kelola sumber daya air.

"Tidak ada organisasi pengelolaan air yang sedetail subak di Bali, mulai dari sisi sosial budaya, kelembagaan, hingga tutupan lahan. Di Bali, mengelola air sudah menjadi bagian dari spirit hidup," ujarnya.

Sejak subak ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO, area Jatiluwih, Tabanan, Bali, ramai dikunjungi wisatawan domestik dan mancanegara. Tokoh subak di Jatiluwih, I Gede Suweden, mengatakan, kini setiap desa meraup penghasilan kotor Rp 1,8 miliar per tahun dari penjualan tiket. "Pendapatan dibagi proporsional untuk pengelola, pemerintah daerah, desa, dan warga di area 'subak kering' atau daerah tempat resapan air di atas hulu mata air," ujarnya. (ABK)

Judul	Seksi 3A Masih Terkendala Pembebasan Lahan	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Anak usaha PT Jasa Marga Tbk., yakni PT Marga Sarana Jabar, menargetkan jalan tol Bogor Ring Road selesai tahun ini meskipun ada sedikit kendala pembebasan lahan pada seksi 3A.		

► BOGOR RING ROAD

Seksi 3A Masih Terkendala Pembebasan Lahan

Bisnis, JAKARTA — Anak usaha PT Jasa Marga Tbk., yakni PT Marga Sarana Jabar, menargetkan jalan tol Bogor Ring Road selesai tahun ini meskipun ada sedikit kendala pembebasan lahan pada seksi 3A.

Direktur Teknik dan Operasi PT Marga Sarana Jabar Alfiandra mengatakan bahwa konstruksi seksi 3A jalan tol Bogor Ring Road (BORR) sudah dimulai sejak 21 Desember 2018 dan akan selesai pada tahun ini. Akan tetapi, katanya, masih terdapat kendala seperti pembebasan lahan di lokasi pembangunan *on/off-ramp* di Kelurahan Cibadak dan Kelurahan Kayu Manis, Kota Bogor.

"Saat ini realisasi progres pembangunan jalan tol Bogor Ring Road, seksi 3A yakni Simpang Yasmin—Simpang Semplak realisasinya sudah 29,73% dari rencana 31,04%," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (1/7).

Dia mengatakan bahwa kendala

di lapangan selain pembebasan lahan adalah progres minus di pekerjaan *pier head*, *ramp*, dan *frontage*.

Pembangunan BORR seksi 3A menghabiskan biaya konstruksi Rp1,50 triliun dan biaya pembebasan lahan seluas 6 hektare sebesar Rp1,50 triliun.

Alfiandra menambahkan bahwa seksi proyek jalan tol sepanjang 2,85 kilometer ini nantinya akan disiapkan lajur 2x3. "Rencana saat ini masih untuk 2x2 lajur, tapi secara konstruksi kami persiapkan untuk menjadi 2x3 lajur."

Untuk ke depannya, rencana kerja yang akan dilakukan adalah pekerjaan *pilecap*, pelebaran jalan, *box girder*, serta pekerjaan *pier* dan *pier head*.

Pembangunan jalan tol BORR seksi 3A ini merupakan lanjutan dari BORR seksi 2B dengan ruas Kedung Badak—Simpang Yasmin sepanjang 2,66 kilometer. Pengerjaan BORR seksi

3A terbagi empat zona dengan pelaksanaan 12 bulan mulai Desember 2018.

Jalan tol BORR merupakan salah satu proyek strategis nasional. Dengan sudah beroperasinya BORR seksi 2B diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas di Kota Bogor, terutama di Jalan Sholeh Iskandar.

Secara keseluruhan, pembangunan jalan tol BORR dibagi menjadi empat seksi, yakni seksi 1 (Sentul Selatan—Kedung Halang) sepanjang 3,85 km telah beroperasi sejak November 2009; seksi 2A (Kedung Halang—Kedung Badak) sepanjang 1,95 km telah beroperasi sejak Mei 2014; seksi 2B (Kedung Badak—Simpang Yasmin) sepanjang 2,65 km telah beroperasi Juni 2018; dan seksi 3A.

Sementara itu, seksi 3 meliputi Simpang Yasmin—Salabenda sepanjang 2,85 kilometer yang akan dikerjakan bertahap, sisanya yakni seksi 3B. *(Krizia P. Kinanti)*

Judul	PROYEK AIR LIMBAH JAKARTA: Jepang Beri Pinjaman Rp4 Triliun	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 7)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat bakal membuka pelelangan proyek Sistem Pengolahan Air Limbah Jakarta atau Jakarta Sewerage System dalam waktu dekat.		

Jepang Beri Pinjaman Rp4 Triliun

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat bakal membuka pelelangan proyek Sistem Pengolahan Air Limbah Jakarta atau Jakarta Sewerage System dalam waktu dekat.

Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, pinjaman diberikan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 30,98 miliar yen atau setara dengan Rp4,03 triliun.

Pinjaman digunakan untuk pembangunan fasilitas pengolahan air limbah dan pembenahan saluran air limbah di DKI Jakarta.

BERDURASI 25 TAHUN

Pinjaman berdurasi 25 tahun dengan masa tenggang 7 tahun. Tingkat suku bunga yang dikenakan sebesar 0,10% per tahun.

Proyek SPAL Jakarta dibutuhkan karena cakupan pelayanan air limbah di Jakarta masih rendah, yakni hanya 7%. Secara langsung SPAL Jakarta akan menambah cakupan pelayanan air limbah.

Pada 2028 atau 3 tahun setelah proyek rampung, sebanyak 198.000 orang bakal menikmati layanan air limbah dengan kapasitas penanganan air limbah 47.000 meter kubik per hari.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melansir bahwa pembangunan Zona 1 dan Zona 6 akan meningkatkan cakupan wilayah pelayanan air limbah di DKI Jakarta sebesar 20%.

Pembangunan di Zona 1 dan Zona 6 diharapkan bisa memberi efek gulir pada pembangunan di 13 zona lainnya sehingga menggenjot jangkauan layanan air limbah. ■

ini selesai dan dilanjutkan ke tahap pelelangan," kata Danis kepada *Bisnis*, Senin (1/7).

Dia menambahkan bahwa proses pelelangan diperkirakan memakan waktu 3 bulan hingga 4 bulan.

Oleh karena itu, dia berharap agar proyek Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) Jakarta bisa memulai konstruksi pada akhir 2019 guna meningkatkan cakupan pelayanan air limbah yang masih rendah.

Danis menyebutkan bahwa proyek SPAL Jakarta akan dibangun secara bertahap, dimulai dari zona 1 dan zona 6 dari total 15 zona yang direncanakan.

Menurutnya, pendanaan untuk proyek SPAL Jakarta berasal dari pinjaman Pemerintah Jepang. Nota pertukaran pinjaman berlangsung pada 27 Mei 2019.

Pihak Jepang diwakili oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii, sedangkan Direktur Jenderal Urusan Asia, Pasifik, dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya menjadi pihak yang mewakili Indonesia.

Berdasarkan keterangan yang dilansir

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Proyek ini dipastikan mendapat pinjaman dari Pemerintah Jepang sebesar Rp4,03 triliun.

Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa pihaknya tengah merampungkan desain teknis untuk Zona 1 dan Zona 6.

Di samping itu, dokumen terkait dengan pelelangan juga sedang disiapkan.

"Saat ini sedang finalisasi desain dan dokumen lelang. Mudah-mudahan Juli

► **Kementerian PUPR tengah merampungkan desain teknis untuk Zona 1 dan Zona 6.**

► **Pinjaman diberikan kepada Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.**

Profil Jakarta Sewerage System (JSS)



JSS merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN). Proyek ini amat penting untuk meningkatkan cakupan wilayah pengolahan air limbah yang saat ini hanya 4% dengan tingkat pencemaran Biologi- cal Oxygen Demand (BOD) 84 mg/l.

Proyek ini menjadi bagian pembangunan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Sistem ini nantinya akan mampu mengolah limbah domestik rumah tangga.

Cara kerjanya, limbah dari rumah tangga akan disalurkan melalui perpipaan kemudian dibawa ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jadi, sebelum dibuang ke sungai, limbah rumah tangga akan diproses dulu di IPAL.

Zona	Luas (Ha)	Kapasitas	Biaya Investasi	Lokasi
Zona 1	4,9	198.000 m ³ /hari	Rp8,1 triliun	Pluit
Zona 6	5,8	282.000 m ³ /hari	Rp8,7 triliun	Duri Kosambi

Kementerian PUPR, diolah

© BISNIS/ADITYA EKO

Judul	KAWASAN INDUSTRI: Jatim Siapkan Lahan Pengembangan 31.784 Ha	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 9)		
Resume	Provinsi Jawa Timur akan terus mengembangkan area kawasan industri (KI) dengan luas potensi lahan 31.784 ha di sejumlah wilayah guna mengakomodasi kebutuhan investasi bidang manufaktur dalam beberapa tahun ke depan.		

Jatim Siapkan Lahan Pengembangan 31.784 Ha

Bisnis, SURABAYA — Provinsi Jawa Timur akan terus mengembangkan area kawasan industri (KI) dengan luas potensi lahan 31.784 ha di sejumlah wilayah guna mengakomodasi kebutuhan investasi bidang manufaktur dalam beberapa tahun ke depan.

Peni Widarti
peniwidarti@bisnis.com

Kepala Bidang Pengembangan Industri dan Perdagangan Disperindag Jatim Saiful Jasin mengatakan, hingga saat ini total kawasan industri *existing* baru sekitar 4.097 ha.

"Pemerintah dan pengembang akan terus menyediakan KI terutama daerah-daerah potensi di luar *ring* satu yang memiliki UMK lebih rendah, sehingga diharapkan bisa memiliki daya saing," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (1/7).

KI itu di antaranya Java Integrated Industrial Port Estate (JIPE) 1.761 ha, Kawasan Industri Gresik (KIG) 140 ha, Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) 248 ha, Sidoarjo Industrial Estate Brebek 87 ha, Ngoro Industrial Park (NIP) 500 ha, Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) 534 ha, dan Safe N Lock Eco Industrial Park 307 ha.

► **Pemprov Jatim menargetkan industri manufaktur bisa tumbuh 7,5% lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sekitar 7%.**

► **Pertumbuhan produksi manufaktur skala besar dan sedang di Jatim pada kuartal I/2019 mengalami kontraksi -0,59% jika dibandingkan kuartal sebelumnya.**



Dia mengungkapkan, kawasan industri yang sedang digarap dan ditawarkan itu di antaranya berada di Gresik, yakni KI Agroindustri Gresik Utara 4.300 ha dan KI Salt Laka 285 ha, sedangkan di Jombang ada Kawasan Industri Ploso seluas 800 ha, serta Kawasan Industri Mojokerto seluas 10.000 ha.

"Di Tuban juga ada ekspansi pengembangan PT Kawasan Industri Gresik seluas 300 ha, dan di Lamongan ada Kawasan Industri Maritim 400 ha, serta Kawasan Industri Wongsorejo [KIW] seluas 480 ha di Banyuwangi," imbuhnya.

Menurutnya, investasi manufaktur yang saat ini dibutuhkan oleh Jatim adalah industri pengolahan barang modal, komponen, dan bahan penolong mengingat selama ini impor bahan baku di Jatim masih sangat tinggi.

"Potensi daerah yang cocok untuk pengembangan industri bahan baku ini bisa Surabaya, Malang, Kediri, Gresik, dan Mojokerto," imbuhnya.

Adapun industri berbasis agro seperti pengolahan daging dan susu lebih cocok dibangun di Pasuruan, Malang, Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, Tulungagung,

Blitar, Batu, Kediri, dan Probolinggo.

Saiful menambahkan, pada tahun ini Pemprov Jatim menargetkan industri manufaktur bisa tumbuh 7,5% lebih tinggi dari realisasi tahun lalu sekitar 7%. Dia meyakini bisa mencapai target lantaran saat ini Jatim sudah memiliki infrastruktur yang menunjang mulai adanya akses jalan tol baru hingga ketersediaan pasokan listrik yang terus dikembangkan PLN.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim, pertumbuhan produksi manufaktur skala besar dan sedang di Jatim pada kuartal I/2019 mengalami kontraksi -0,59% jika dibandingkan kuartal sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama 2018, industri Jatim tumbuh 7,34%.

"Sejak 2017, manufaktur Jatim tumbuh dengan bagus, di kuartal I bisa tumbuh 7,45% padahal pada kuartal I/2016 cuma bisa tumbuh 3,47%," kata Kepala BPS Jatim Teguh Pramono.

Dia menambahkan, produksi industri skala besar dan sedang yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada kuartal I/2019 yakni industri furnitur 68,50% (yoy) dan industri mamin 65,60% (yoy). □

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 2 Juli 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman 23)		
Resume	Personel TNI bersama sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian tetap (huntap) bantuan Yayasan Budha Tzu Chi bagi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kelurahan Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/7).		

► **PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP**



Antara/Mohamad Hamzah

Personel TNI bersama sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan hunian tetap (huntap) bantuan Yayasan Budha Tzu Chi bagi korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kelurahan Tondo, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/7). Keikutsertaan anggota TNI terse-

but ditujukan untuk membantu dan mempercepat pembangunan bantuan ribuan huntap agar segera dapat ditempati oleh masyarakat korban bencana alam.